

► PASAR IR. SOEKARNO

Pertanyakan Lelang, PT Ampuh Surati Pekab

SUKOHARJO—PT Ampuh Sejahtera bereaksi terhadap pengumuman pemenang lelang pekerjaan tahap II sekaligus penyelesaian Pasar Ir. Soekarno dengan mengirimkan surat kepada Pemkab Sukoharjo.

Melalui surat itu, kontraktor pelaksana proyek tahap I Pasar Ir. Soekarno tersebut meminta penjelasan dari Pemkab terkait pelaksanaan lelang. Sebab, lelang itu dilakukan pada objek yang masih dalam sengketa hukum di dua pengadilan negeri (PN).

Manajer Teknis PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono, ketika ditemui *Espos* di Sukoharjo, Rabu (18/6), mengatakan surat bernomor 1399/AMPS/SKH/VI/2014 itu sudah dikirimkan kepada ketua panitia lelang proyek pembangunan tahap II Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo dan pengguna anggaran (PA) proyek tersebut.

"Karena kami menanyakan hal itu secara formal dan resmi, maka kami menunggu balasan resmi dari pihak terkait. Kami ingin mengetahui landasan mereka melakukan lelang. Tetapi, kalau surat itu tidak dibalas, kami terpaksa melaporkan lagi hal itu ke penegak hukum," kata Ajiyono.

Sesuai salinan surat yang diterima *Espos*, Rabu, PT Ampuh Sejahtera yang berkantor di Jl. Bengawan Solo 2A, Sukoharjo itu mencantumkan enam poin pernyataan sekaligus pertanyaan kepada Pemkab Sukoharjo. Enam poin itu, *pertama*, objek yang dilelangkan belum diserahkan dari PT Ampuh Sejahtera ke Pemkab Sukoharjo, *kedua*, objek yang dilelangkan masih dalam sengketa di PN Sukoharjo.

Ketiga, perselisihan penghitungan prestasi pekerjaan yang dikeluarkan secara sepihak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat diyakini kebenarannya. *Keempat*, gugatan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas audit objek lelang juga masih diproses di PN Semarang. *Kelima*, masih banyak barang milik PT Ampuh Sejahtera yang berada dalam objek pelelangan, dan *keenam*, kekurangan pembayaran 25 persen nilai proyek belum dilunasi oleh Pemkab.

"Kalau objek itu lalu dibangun, siapa yang bertanggung jawab kalau barang-barang kami yang ada di sana hilang? Kalau bangunan diubah sementara itu jadi alat bukti, siapa juga yang bertanggung jawab?" tanya dia.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukoharjo, Purwadi, saat dihubungi *Espos*, Rabu, mengaku belum bisa mengomentari surat dari PT Ampuh Sejahtera. Ia mengaku belum menerima surat itu. "Dalam pelelangan, tidak ada ketua panitia lelang. Adanya ketua kelompok kerja [pokja]," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sukoharjo, A.A. Bambang Haryanto, tak merespons permintaan wawancara dari *Espos*, Rabu. (Ivan Andimuhtarom)